

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai data pendukung penelitian. Oleh karena itu peneliti memberikan gambaran mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Peran Pengurus Posdaya Dalam Kesejahteraan Keluarga, sebagai berikut:

1. Anistiara Ramadhanti. 2020. *Posdaya Sebagai Media Pemberdayaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris terkait upaya pemberdayaan masyarakat posdaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dilihat dari aspek 1) strategi yang dilakukan, 2) upaya peningkatan partisipasi anggota dan 3) upaya pemeliharaan keberlanjutan program.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yaitu pengurus dan anggota agar dapat memberikan penjelasan mengenai upaya Posdaya Plamboyan Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Lembang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan posdaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung atas berbagai upaya, yaitu: 1) penggunaan pendekatan dan *strategi top down* dan *bottom up*, sehingga terjadi proses pengembangan program yang berbasis pada kebutuhan dan masalah yang

dihadapi oleh masyarakat, maka program disusun dalam bentuk pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan; 2) peningkatan partisipasi anggota yang dilakukan melalui upaya: penjangkauan masyarakat dan pendekatan berbasis masyarakat, dan; 3) pemeliharaan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat yang menekankan kepada prinsip *sustainability* yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas secara berkelanjutan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayaan.

2. Nadia Nur Ramdani, dkk (2020). *Peran Posdaya dalam Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Bubulak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran posdaya dalam pengembangan pendidikan anak usia dini di Kampung Batu Hulung, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat melalui program SUIJI-SLP (*Six University Initiative Japan Indonesia – Service Learning Program*).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengambilan data yaitu observasi dan wawancara mendalam kepada masyarakat, pengurus Posdaya, dan pihak P2SDM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Posdaya Sejahtera dalam penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di PAUD SPS Pelangi yaitu dengan menjadi pembentuk dan penguat bagi PAUD sehingga dapat terus ada serta memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak di daerah tersebut. Berdirinya Posdaya yang dari, oleh dan bertujuan untuk masyarakat memberikan

sebuah pemahaman baru bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini di desa ini.

3. Isra Harun, dkk. 2019). *Peranan Kelembagaan Posdaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.*

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peranan kelembagaan posdaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kepada ketua, pengurus dan anggota posdaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kelembagaan posdaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara dalam memberikan bantuan hanya berupa uang, namun terdapat kelompok yang tidak menerima lagi bantuan tersebut karena sudah tidak membayar. Peran kelembagaan posdaya melalui keterlibatan semua pihak dengan adanya keterlibatan pemerintah desa dan anggota kelompok yang dibentuk. Mekanisme pekerjaan kelembagaan posdaya di Desa Tolite Jaya sesuai dengan bentuk bantuan yang diajukan.

4. Ajeng Dinantika Rahayu, dkk (2022). *Efektifitas Penerapan Pos Pemberdayaan Keluarga di Posdaya Bacang, Kelurahan Srengseng Sawah Dalam Tingkat Kesejahteraan Keluarga.*

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas posdaya dalam tingkat kesejahteraan keluarga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Posdaya Bacang, Srengseng Sawah sangat positif dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Masyarakat merasa sangat terbantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta dinilai mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa *output* dari Program Posdaya Bacang yaitu masyarakat mendapatkan sosialisasi terkait program, menjalankan program demi program berdasarkan kesepakatan bersama, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan kewirausahaan serta kegiatan simpan pinjam.

5. Faima Ulfauziah (2021). *Peran Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Kusuma Jaya Dalam Memberdayakan Masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam terkait peran dan wujud peran Posdaya Kusuma Jaya dalam memberdayakan keluarga di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Teknik validitas data yang digunakan adalah teknik

*credibility* dan *confirmability* sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik.

Hasil dari penelitian ini adalah Peran Posdaya Kusuma Jaya dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai fasilitator dan wadah atau tempat masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekitar, mensejahterakan ekonomi masyarakat, mendorong masyarakat untuk lebih dekat dengan Allah serta menjadikan masyarakat Muktiharjo Kidul sadar akan kesehatan serta memiliki pendidikan yang layak, sehingga masyarakat Muktiharjo Kidul dikatakan masyarakat yang berdaya atau sejahtera. Wujud peran Posdaya Kusuma Jaya adalah terwujudnya program kerja posdaya jangka panjang, pendek dan menengah, yaitu di bidang pendidikan, tidak ada lagi anak putus sekolah. Di bidang ekonomi melalui pengembangan warung posdaya menjadikan ekonomi masyarakat meningkat. Di bidang kesehatan melalui pelayanan kesehatan menjadikan masyarakat terhindar dari penyakit, pemanfaatan lahan di bidang lingkungan berguna untuk masyarakat sekitar khususnya masyarakat Muktiharjo Kidul.

6. Sofyan Tri Untoro. 2015. *Peran Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Edelwys Dalam Menangani Ketahanan Pangan Di Dusun Serut Palbapang Bantul D.I.Y.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran-peran yang dilakukan oleh pengurus Posdaya Edelwys dalam menangani ketahanan pangan di Dusun Serut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menentukan sumber data menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan dan dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa peran yang dilakukan oleh pengurus Posdaya Edelwys yaitu fasilitator, mediator, dan motivator. Faktor pendukung dan penghambat Posdaya Edelwys dalam menangani ketahanan pangan di Dusun Serut yang utama diantaranya banyaknya dukungan dan rendahnya partisipasi remaja dalam program ketahanan pangan serta rendahnya sumber daya manusia.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Anistiara Ramadhanti . 2020. Indonesian Journal Of Adult and Community Education Vol. 2, No.1 (Universitas Pendidikan Indonesia)	Posdaya Sebagai Media Pemberdayaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga	1. Lokasi penelitian yaitu di Posdaya Plamboyan. 2. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif.	1. Variabel penelitian yang digunakan adalah upaya pemberdayaan posdaya sedangkan peneliti menggunakan variabel peran pengurus posdaya. 2. Aspek penelitian dilihat dari strategi, upaya peningkatan partisipasi anggota dan upaya pemeliharaan keberlanjutan program. Sedangkan peneliti melihat peran fasilitatif, edukatif dan representatif pengurus posdaya.
2	Nadia Nur Ramdani, dkk (2020), Jurnal Inovasi Masyarakat, IPB University	Peran Posdaya dalam Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Bubulak	1. Variabel penelitian yaitu peran. 2. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	1. Lokasi penelitian di Posdaya Kelurahan Bubulak sedangkan peneliti di Posdaya Plamboyan Desa Kayuambon. 2. Apek Penelitian peran posdaya sebagai pembentuk dan penguat, Sedangkan peneliti melihat peran fasilitatif, edukatif dan representatif pengurus posdaya.
3	Isra Harun, dkk (2019), JSAP: Journal Syariah and Accounting Public, Universitas Muhammad iyah Gorontalo	Peranan Kelembagaan Posdaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.	1. Variabel yang digunakan yaitu Peranan. 2. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Subjek penelitian yaitu Posdaya.	1. Lokasi penelitian di Posdaya Desa Tolite sedangkan peneliti di Posdaya Plamboyan Desa Kayuambon. 2. Aspek Penelitian yaitu posdaya sebagai pemberi bantuan, keterlibatan berbagai pihak, dan mekanisme kerja posdaya, Sedangkan peneliti melihat peran fasilitatif, edukatif dan representatif pengurus posdaya.

4	Ajeng Dinantika Rahayu, dkk (2022). Jurnal Kesehatan Tambusai. UPN Veteran Jakarta.	Efektifitas Penerapan Pos Pemberdayaan Keluarga di Posdaya Bacang, Kelurahan Srengseng Sawah Dalam Tingkat Kesejahteraan Keluarga.	1. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif.	1. Variabel yang digunakan yaitu efektifitas sedangkan peneliti menggunakan variabel peran. 2. Lokasi penelitian di Posdaya Bacang sedangkan peneliti di Posdaya Plamboyan 3. Aspek penelitian yaitu kebermanfaatan posdaya, program kegiatan posdaya dan partisipasi masyarakat, Sedangkan peneliti melihat peran fasilitatif, edukatif dan representatif pengurus posdaya.
5	Faima Ulfauziah (2021). Skripsi. Uin Walisongo Semarang	Peran Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Kusuma Jaya Dalam Memberdayakan Masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	1. Variabel yang digunakan yaitu Peran. 2. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif.	1. Lokasi penelitian di Posdaya Kusuma Jaya sedangkan peneliti di Posdaya Plamboyan 2. Aspek penelitian yaitu peran posdaya sebagai fasilitator, peran posdaya sebagai wadah pengembangan potensi dan wujud nyata peran posdaya, Sedangkan peneliti melihat peran fasilitatif, edukatif dan representatif pengurus posdaya.
6.	Sofyan Tri Untoro. (2015). Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta	Peran Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Edelwys Dalam Menangani Ketahanan Pangan Di Dusun Serut Palbapang Bantul D.I.Y	1. Variabel yang digunakan yaitu Peran. 2. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif.	1. Lokasi penelitian di Posdaya Edelwys sedangkan peneliti di Posdaya Plamboyan 2. Aspek penelitian yaitu peran pengurus posdaya sebagai fasilitator, mediator, dan motivator serta faktor pendukung dan penghambat posdaya, Sedangkan peneliti melihat peran fasilitatif, edukatif dan representatif pengurus posdaya.

## 2.2 Tinjauan yang Relevan dengan Penelitian

### 2.2.1 Tinjauan Tentang Peran dalam Pengembangan Masyarakat

#### 2.2.1.1 Konsep Peran

Peran dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in understanding*”, yang berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Menurut terminologi peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Terdapat dua macam peran yaitu; peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*) yang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi dan biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Sedangkan peran menurut Soekanto (2017) mengartikan peran sebagai aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Bruce J. Cohen dalam Rahmawati (2019: 25) membagi peran kedalam beberapa jenis sebagai berikut:

1. Peranan nyata (*anacted role*) yaitu cara yang benar-benar dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran;
2. Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dalam menjalankan peran;
3. Konflik Peranan (*role conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain;
4. Kesenjangan peranan (*role distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional;

5. Kegagalan peranan (*role failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu;
6. Model peranan (*role model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya dapat dicontoh, ditiru dan diikuti;
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada mereka yang sedang menjalankan perannya.

Menurut Levinton dalam Soekanto (2017: 213) menyatakan bahwa peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Fungsi yang dimaksud adalah apabila seseorang menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan kedudukannya maka orang atau organisasi tersebut berperan. Penyesuaian diri yang dimaksud adalah perilaku-perilaku yang ditampilkan dibatasi oleh kedudukannya dan peran yang dimiliki. Peran sebagai suatu proses merujuk pada tahapan pelaksanaan fungsi dan tugas yang dilakukan oleh pemegang peran.

Soekanto (2017) membagi peran menjadi tiga hal sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (2017: 242), Peran dibagi menjadi tiga macam yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif merupakan peran yang kedudukannya di pilih oleh anggotanya secara langsung, peran aktif ini merupakan peran yang sangat penting didalam sebuah organisasi. Contohnya seperti pengurus atau pejabat. Peran partisipatif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya, yang berfungsi untuk memberikan sumbangan

yang berharga untuk kelompok itu sendiri. Peran pasif merupakan sumbangan anggota kelompok, atau memberikan kelompok lain kesempatan untuk melaksanakan kegiatan agar sebuah organisasi tersebut berjalan dengan baik, sumbangan yang diberikan biasanya berupa keperluan kelompok berupa barang atau materil.

Fungsi peran dalam masyarakat adalah sebagai berikut: pertama, memberi arah pada proses sosialisasi. Kedua, pewaris tradisi, kepercayaan, nilai, norma dan pengetahuan. Ketiga, dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat. Keempat, menghidupkan sistem pengendalian kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (Narwoko dan Suyanto, 2014: 160).

Dari beberapa pengertian di atas, peran merupakan suatu tindakan atau perilaku seseorang yang di lakukan di masyarakat sesuai dengan posisi atau kedudukan di dalam masyarakat. Seseorang di harapkan menjalankan kewajibannya sesuai dengan peranannya baik di dalam keluarga maupun masyarakat.

#### 2.2.1.2 Peran Pengembang Masyarakat (*Community Development Worker Roles*)

Peran yang terkait dengan pengembang masyarakat adalah sesuai dengan yang dikemukakan Jim Ife dan Tesoriero (2016) yang erat kaitannya dengan intervensi kepada masyarakat, sebagai berikut:

##### 1. Peran Fasilitatif (*Facilitative Roles*)

Peran pertama adalah memfasilitasi komunitas sasaran. Pengembang masyarakat harus dapat melakukan mediasi dan negosiasi (*mediation and*

*negotiation*), memberikan dukungan (*support*), memfasilitasi kelompok (*group facilitation*), pemanfaatan sumber daya dan keterampilan (*utilization of skills and resource*).

a. Mediasi dan Negosiasi (*mediation and negotiation*)

Pengembang masyarakat dalam menjalankan kegiatannya seringkali berbenturan dengan konflik kepentingan-kepentingan maupun konflik masyarakat. Oleh karena itu, seorang pengembang masyarakat harus dapat menengahi (bertindak sebagai mediator) dan dapat melakukan perundingan-perundingan (bertindak sebagai negosiator) bagi kelompok yang sedang berkonflik untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam hal ini seorang pengembang masyarakat harus dapat menjaga netralisasinya dan memediasi dan menegosiasi kelompok-kelompok masyarakat yang tampak bertikai. Artinya, Ia tidak boleh memihak salah satu diantara kelompok tersebut.

b. Pemberian Dukungan (*Support*)

Pemberian dukungan ini meliputi upaya untuk memperkuat, mengakui dan menghargai nilai orang lain, menghargai kontribusi orang lain. Menurut Taylor (2003) dukungan sosial dibagi menjadi 4 jenis yaitu: 1) dukungan instrumental—ketika individu dalam tekanan, dukungan diberikan dalam bentuk fasilitas atau bantuan langsung, seperti jasa, bantuan keuangan, atau barang; 2) dukungan informasi—ada informasi tentang pengobatan yang dapat dilakukan individu, nasehat, informasi untuk kesadaran atau bimbingan untuk memecahkan masalah ketika orang tersebut sedang stres; 3) dukungan emosional—membuat orang percaya bahwa mereka adalah orang yang

berharga, mengungkapkan empati dan kepedulian terhadap individu dapat membuat mereka, merasa nyaman, tenang dan dicintai di bawah situasi yang penuh tekanan; 4) dukungan penghargaan—memberikan dukungan dalam bentuk penghargaan positif, penghargaan individu atas usaha mereka dan memperkuat tindakan positif individu dalam kondisi stres.

c. Fasilitasi Kelompok (*Group Facilitation*)

Pada penelitian ini, fasilitasi kelompok berfokus pada bagaimana posdaya plamboyan memberikan fasilitas fisik dan non fisik untuk keperluan mencapai tujuan bersama. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan konsumen dalam menggunakan jasa perusahaan tersebut. Fasilitas adalah sumberdaya fisik yang ada sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen (Tjiptono, 1997 dalam Zuardi, 2016). Sedangkan menurut Kotler (2005) dalam Zuardi (2016) mendefinisikan fasilitas yaitu segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Fasilitas fisik adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat dibendakan, yang mempunyai peranan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha (Zuardi, 2016). Fasilitas non-fisik merujuk pada komponen yang mendukung kegiatan organisasi namun tidak berkaitan dengan aspek fisik (Zuardi, 2016)

d. Pemanfaatan Berbagai Keterampilan dan Sumber Daya (*Utilization of Skills and Resources*)

Pengembang masyarakat berperan dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya dan keterampilan yang ada dalam masyarakat maupun kelompok.

Misalnya, ada kelompok yang memiliki keterampilan menjahit, kerajinan tangan, memasak, membuat, dan lain-lain. Berbagai kelompok ini harus mendapat perhatian dari pengembang masyarakat agar dapat mengoptimalkan mereka serta melihat target pasar untuk menjual produk tersebut. Aset komunitas yang terdiri dari aset manusia, aset fisik, aset sosial, aset finansial, dan aset nantural (United Kingdom Departement for International Development (DFID) dalam Riyanti, 2021).

## 2. Peran Edukatif (*Educational Roles*)

Peran yang harus dilakukan pengembang masyarakat dalam mendidik masyarakat meliputi: peningkatan kesadaran masyarakat (*consciousness raising*), pemberian informasi (*informing*), dan pelatihan (*training*)

### a. Membangkitkan Kesadaran Masyarakat (*Consciousness-Raising*)

Peningkatan kesadaran diawali dengan upaya membangun hubungan antara kepentingan personal dengan kepentingan politis, atau kepentingan individual dengan kepentingan struktural. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam menentukan masalah, harapan aspirasi, dan penderitaan yang dialaminya dalam perspektif yang lebih luas. Komponen penting dari peningkatan kesadaran adalah membangun kesadaran masyarakat tentang struktur dan strategi perubahan sosial dimana mereka dapat beradaptasi dan berperan secara efektif. Terkadang masyarakat menjadi pasif bukan karena mereka menginginkannya seperti itu, melainkan karena belum mengenal dan memahami struktur dan strategi yang ada.

### b. Pemberian Informasi (*Informing*)

Pengembang masyarakat membantu memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat. Aspek-aspek yang berkaitan dengan informasi demografi dan indikator-indikator sosial seperti: struktur usia, tingkat kematian, tingkat kenakalan remaja, distribusi pendapatan, dan pengelompokkan etnis dapat menjadi informasi penting bagi masyarakat untuk menyusun profil mereka sendiri. Informasi tentang sumber-sumber eksternal seperti sumber dana, tenaga ahli, pedoman pelaksanaan program, presentasi audio-visual dan paket-paket pelatihan dan sebagainya. Informasi-informasi ini sangat berguna bagi masyarakat dalam menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

c. Melakukan Pelatihan (*Training*)

Pelatihan secara sederhana adalah mengajarkan kepada orang lain bagaimana melakukan sesuatu. Seorang pengembang masyarakat tidak menempati posisi sebagai pelatih melainkan membantu masyarakat untuk mendapatkan tenaga ahli yang dapat bertindak sebagai pelatih. Ia dapat menjadi seorang pelatih apabila memiliki kemampuan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dalam konteks pengembangan masyarakat pelatihan dapat dilakukan secara sederhana seperti pelatihan: pemanfaatan waktu luang, pengelolaan pertemuan/rapat, dan pengambilan keputusan consensus. Pelatihan juga dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masyarakat seperti pelatihan: pemberantasan buta huruf, gizi, anggaran, bahasa dan penyusunan proposal dan sebagainya. Pelatihan juga dapat diarahkan pada kegiatan yang bersifat rekreasional atau hiburan seperti pelatihan: mendaki gunung, *public speaking*, kesehatan dan kebugaran, musik, drama dan sebagainya. Pada akhirnya pelatihan ini sering

pula beorientasi pada ekonomi seperti pelatihan: kerja, kewirausahaan, dan sebagainya.

### 3. Peran Representatif (*Representational Roles*)

Peran pengembang masyarakat selanjutnya adalah peran sebagai wakil masyarakat dalam melakukan interaksi dengan pihak eksternal dengan bertujuan untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Peran representatif terdiri dalam hal memperoleh sumber daya (*obtaining resource*), advokasi (*advocacy*), membina hubungan masyarakat (*public relations*), mengembangkan jaringan (*networking*)

#### a. Memperoleh Berbagai Sumber Daya (*Obtaining Resources*)

Pengembang masyarakat seringkali membantu sebuah masyarakat atau kelompok masyarakat untuk memperoleh berbagai sumber informasi, keterampilan dan keahlian dari luar masyarakat yang dibutuhkan agar mampu mendirikan berbagai strukturnya sendiri dan menemukan berbagai tujuannya sendiri. Dalam hal sumber pendanaan pengembang masyarakat biasanya mengajukan permohonan dana dari luar untuk membiayai sebuah program atau proyek.

#### b. Melakukan Advokasi (*Advocacy*)

Dalam peranan ini pengembang masyarakat melakukan kegiatan seperti dengar pendapat, *lobbying* dengan para politisi atau para pemegang kekuasaan, dan membentuk perwakilan di pemerintahan lokal maupun pusat. Peranan advokasi sangat diperlukan terutama untuk membela masyarakat yang menjadi korban penindasan atau tindakan kesewenang-wenangan pihak-pihak yang berkuasa.

#### c. Hubungan Masyarakat (*Publik Relations*)

Pengembang masyarakat memahami gambaran tentang proyek-proyek masyarakat dan memublikasikannya dalam konteks yang lebih luas. Peranan yang termasuk dalam hubungan masyarakat antara lain: terlibat dalam pertemuan dengan organisasi, pemerintah maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu, bisa juga berupa spanduk, poster, leaflet dsb. bentuk-bentuk hubungan masyarakat yang dikemukakan oleh Narti (2016) bahwa memberikan informasi yang pantas/layak dimuat di surat kabar atau media massa lainnya agar dapat menarik perhatian publik terhadap sesuatu-baik baik seseorang, produk, jasa, atau organisasi.

d. Jaringan Kerja (*Networking*)

Jaringan kerja berarti mengembangkan relasi dengan berbagai pihak dan berupaya mendorong mereka untuk turut serta dalam upaya perubahan. Seorang pengembang masyarakat dapat menjalin jaringan kerja dengan masyarakat, pengembang masyarakat lain, para pekerja lapangan (seperti dokter, psikolog, para pekerja sosial, pekerja kesehatan), orang-orang kunci di pemeritahan, para politisi, akademisi, peneliti, tokoh masyarakat, maupun perwakilan dari kelompok-kelompok tertentu. konsep pentahelix yang dikemukakan oleh Flagship dalam Prabowo (2018) bahwa model kemitraan pentahelix ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan manfaat yang lebih sebagaimana model yang efektif dan efesien harus dilakukan dengan persyaratan khusus, dalam model pentehlix terdapat kemitraan didalamnya, adapun kemitraan bisa diartikan sebagai suatu

kesepakatan hubungan kerjasama antara dua atau beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama

## **2.2.2 Tinjauan Pemberdayaan Keluarga Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat.**

### **2.2.2.1 Pemberdayaan Masyarakat**

Istilah pemberdayaan muncul pada periode tahun 1970 hingga tahun 1980-an. Pada masa itu Indonesia merupakan negara acuan dunia di bidang pembangunan terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dapat dikatakan upaya masyarakat dalam mengoptimalkan potensinya agar mampu memperoleh keterampilan dan pengetahuan dalam membangun serta memperbaiki kehidupannya dan kehidupan orang lain. Suharto (2017: 59-60) mengemukakan pemberdayaan sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pendapat tersebut diperkuat oleh Kindervatter dalam Reziana dan Siswanto (2017) yaitu pemberdayaan adalah

orang-orang mendapatkan pemahaman dan kontrol atas kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik untuk meningkatkan kedudukan mereka di masyarakat.

Sedangkan menurut Slamet dalam Anwas (2019: 49), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu mengandung makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, berani mengambil risiko, serta mampu mengambil keputusan sesuai inisiatif. Adapun menurut Chamber dalam Sutarto (2018) pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang didalamnya terangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*

Menurut Anwas (2019: 50) pemberdayaan dalam pelaksanaannya memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan pemberdayaan memiliki tujuan mampu mengubah perilaku dan kebiasaan lama masyarakat menuju perilaku baru yang lebih baik agar mampu mandiri dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat

mendorong masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk dari pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan melalui keluarga.

Menurut Santosa, Heru, dkk (2020) pemberdayaan keluarga mencakup dimensi yang luas dari kebutuhan keluarga yang bersifat biopsikososio kultural dan spiritual. Konsep pemberdayaan keluarga menurut Dunts, dkk (1994) dalam Warsindah, dkk (2021) memiliki tiga komponen utama. Pertama, bahwa semua keluarga telah memiliki kekuatan dan mampu membangun kekuatan itu. Kedua, kesulitan keluarga dalam memenuhi kebutuhan bukan karena ketidakmampuan untuk melakukannya, melainkan sistem pendukung sosial keluarga tidak memberikan peluang keluarga untuk mencapainya. Ketiga, dalam upaya pemberdayaan keluarga, anggota keluarga berupaya menerapkan keterampilan dan kompetensi dalam rangka terjadinya perubahan dalam keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan keluarga mengarah kepada terwujudnya kualitas keluarga yang mandiri agar dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan materialnya hingga terwujud pula keluarga yang sejahtera secara lahir maupun batin

Dwidjowijoto (2007) dalam Endah (2020) bahwa sebagai proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Dalam tahap penyadaran target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi

berada atau mampu. Kemudian pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut

#### 2.2.2.2 Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat memiliki pendekatan dan strategi dalam pelaksanaannya. Menurut Wrihatnolo (2007) dalam Lubys (2021: 63) upaya memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari 3 aspek yaitu *enabling* (menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang), *empowering* (memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai *input* dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya) dan *protecting* (melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah).

Pelaksanaan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto (2017), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P, sebagai berikut:

- 1) Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
- 2) Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian
- 3) Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah. mereka. agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antar yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan
- 5) Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan 5P yang diungkapkan di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan dalam pemberdayaan itu harus mengedepankan potensi masyarakat dengan diperkuatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat sehingga masyarakat itu sendiri dapat melindungi dirinya dari kemiskinan. Selain itu, perlu adanya bimbingan kepada masyarakat agar mampu menjalankan tugas kehidupannya dan mampu memelihara kondisi yang kondusif serta seimbang.

Pendapat lain menurut Elliot dalam Fuadi (2021: 65) model pendekatan yang digunakan terdapat 3 jenis pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) Pendekatan kesejahteraan, dengan menggunakan pendekatan ini fokus utamanya lebih dipusatkan pada kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat termasuk didalamnya bagi mereka yang menghadapi musibah seperti bencana alam.
- 2) Pendekatan pembangunan, dalam pendekatan ini kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan lebih difokuskan pada upaya peningkatan kemandirian, keswadayaan serta kemampuan masyarakat
- 3) Pendekatan pelatihan berkelanjutan, dalam hal ini perlu dilakukan berbagai bentuk kegiatan pelatihan dikalangan kelompok agar mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan keterpurukan sehingga mereka dapat membentuk suatu kelompok yang maju dan mandiri serta bebas dari aneka ragam ketidakberdayaan

Adapun menurut Anwas (2019) mengenai model pendekatan *top down* bahwa pada pendekatan ini berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat dirumuskan dari dan oleh orang luar tanpa melibatkan masyarakat. Model *top down* memiliki

kelebihan waktu yang dibutuhkan dalam pembangunan atau pemberdayaan relatif singkat dan cepat. Sedangkan model pendekatan *bottom up* menekankan pada partisipasi masyarakat. Model ini menjadi penyempurna model *top down* karena masyarakat lebih merasa dihargai dan turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan atau pemberdayaan .

Setelah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang telah dikemukakan diatas, maka selanjutnya dijelaskan tentang strategi pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebiato (2015: 168) strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah yaitu; 1) pemihakan dan pemberdayaan masyarakat; 2) pementapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat, dan; 3) modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan, budaya, dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat).

Pendapat lain menurut Nasikun (1995) dalam Santoso (2018) memaparkan bahwa strategi pemberdayaan dibagi menjadi 4 yaitu, 1) Strategi pembangunan gotong royong. prosedur gotong royong bersifat demokratis, dilakukan diatas kekuatan sendiri dan sukarela; 2) Strategi pembangunan teknikal-profesional, maksudnya dalam memecahkan berbagai masalah masyarakat adalah dengan cara mengembangkan norma, peranan dan prosedur baru untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah; 3) Strategi Konflik, maksudnya strategi ini menekankan perhatian pada perubahan organisasi dan peraturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat, dan; 4) Strategi pembelotan

kulturan, yaitu menekankan pada perubahan tingkat subyektif individual mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang manusiawi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemberdayaan terdapat empat cara diantaranya membangun relasi pertolongan, membangun komunikasi, terlibat dalam pemecahan masalah, dan merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial. Keempat hal tersebut mampu menjadi acuan yang ideal dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat.

Dalam konteks pekerjaan sosial, menurut Suharto (2017) pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*), yaitu:

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *strees management*, dan *crisis intervention*.
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksis

sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

#### 2.2.2.3 Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan dalam perspektif pekerjaan sosial menurut Suharto (2017: 68-69) sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner.
- 2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- 3) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- 4) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat
- 5) Solusi solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- 6) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- 7) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri; tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.

- 8) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dan memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- 9) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- 10) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutive; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- 11) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

### **2.2.3 Tinjauan Tentang Kesejahteraan Keluarga**

#### **2.2.3.1 Konsep Kesejahteraan Keluarga**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang terkecil yang terdiri atas ayah, ibu serta anak (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*) (Goode, 2004:11). Keluarga merupakan komunitas primer yang terpenting dalam masyarakat, komunitas primer artinya suatu kelompok dengan kedekatan antara anggota-anggotanya sangat erat. Menurut Friedman dalam Pattiruhu (2019) mendefinisikan bahwa keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan aturan dan emosional dan setiap individu mempunyai peran masing-masing sesuai dengan statusnya dalam keluarga tersebut.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang hidup bersama yang saling terikat dengan aturan dan emosional, dan setiap individu mempunyai peran masing-masing sesuai dengan bagiannya didalam keluarga tersebut.

Menurut Soleman dalam buku Kuswardinah (2019: 17-18), didalam perkembangannya keluarga diharapkan dapat memenuhi fungsinya, yaitu fungsi biologis, ekonomis, dan sosial psikologis. Keluarga sebagai fungsi biologis, artinya pada hakikatnya keluarga merupakan lembaga sosial yang paling tinggi, oleh karena itu keluarga membutuhkan keturunan untuk dapat mewariskan nilai hidup, sosial, dan kekayaan.

Keluarga sebagai fungsi ekonomis, artinya bahwa sebuah keluarga membutuhkan sebuah materi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dalam menyukupi kebutuhannya suami dan istri berusaha mencari kebutuhan tersebut. Keluarga sebagai fungsi sosial psikologis, artinya keluarga merupakan kelompok pertama yang dikenal anak dalam hubungan antar manusia, manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi, ibu memiliki peran penting untuk memonitori anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya..

Apabila dilihat dalam pandangan sistem, kesejahteraan dapat diposisikan sebagai output atau hasil dari sebuah proses pengelolaan *input* (sumberdaya) yang tersedia, dimana kesejahteraan sebagai output pada suatu titik dapat menjadi sumber daya atau input untuk diproses menghasilkan tingkat kesejahteraan keluarga pada tahap berikutnya. Kesejahteraan keluarga pada hakikatnya mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan spiritual.

Kesejahteraan keluarga juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi (*family well-being*) yang diukur dari pemenuhan input keluarga (misalnya diukur dari pendapatan, upah, aset, dan pengeluaran keluarga) dan kesejahteraan

material (*family material well-being*) yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga. Pengukuran kesejahteraan material relative lebih mudah akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan materi,

Sedangkan Puspitawati (2012: 8) membagi kesejahteraan keluarga menjadi kesejahteraan keluarga obyektif dan kesejahteraan keluarga subyektif. Kesejahteraan keluarga obyektif berdasarkan kriteria Sayogyo dalam Puspitawati, (2012: 8) yakni menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan (membedakan daerah pedesaan dan perkotaan). Untuk daerah pedesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun. Kesejahteraan keluarga subyektif menurut McCall dalam Puspitawati (2012) menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga juga dapat diukur melalui pendekatan *Quality of Life* yaitu diukur berdasarkan kebutuhan untuk kesenangan seseorang.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga dapat dikatakan sejahtera dengan melihat berbagai dimensi yang ada seperti ekonomi, sosial, psikologi, dan spiritualnya. Dengan berbagai dimensi ini keluarga mendapatkan apa yang dibutuhkannya bukan mendapat apa yang diinginkannya karena pemenuhan kebutuhan bagi keluarga merupakan hal yang terpenting untuk dipenuhi guna mencapai kesejahteraan dalam keluarganya

#### 2.2.2.4 Indikator Keluarga Sejahtera

Salah satu indikator dari kesejahteraan keluarga yaitu bisa dilihat dari fungsi keluarga. Fungsi pokok keluarga menurut Friedman dan Bowden (2010) dalam Salamung, dkk (2021:5) yaitu fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi dan fungsi perawatan. Fungsi afektif adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain, fungsi sosialisasi yaitu proses perkembangan dan perkembangan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya, fungsi reproduksi adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga, fungsi ekonomi yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan fungsi perawatan atau pemeliharaan adalah untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi.

Menurut BKKBN dalam Oktriawan (2022) membagi kesejahteraan keluarga ke dalam tiga kebutuhan yakni: 1) kebutuhan dasar (*basic needs*) yang terdiri dari variabel pangan, sandang, papan dan kesehatan; 2) kebutuhan sosial psikologis (*social psychological needs*) yang terdiri dari variabel pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi sosial internal dan eksternal; 3) kebutuhan pengembangan (*developments needs*) yang terdiri dari variabel tabungan, pendidikan khusus, akses terhadap informasi.

Berdasarkan acuan tersebut, dikembangkan indikator keluarga sejahtera yang meliputi: 1) Keluarga Pra-Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan; 2) Keluarga Sejahtera-1 adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca dan tulis latin, dan keluarga berencana; 3) Keluarga Sejahtera-2 adalah keluarga yang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya dan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya seperti peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi; 4) Keluarga Sejahtera-3 adalah keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologisnya, dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan, dan sebagainya, dan; 5) Keluarga Sejahtera-3 Plus adalah keluarga- keluarga yang telah mampu memenuhi semua kebutuhannya baik yang bersifat dasar, sosial psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa indikator keluarga sejahtera diantaranya yaitu *basic needs*, *social psychological needs*, dan *development needs*. Keluarga dapat dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi ketiga indikator tersebut, maka dapat digolongkan menjadi 5 kategori keluarga pada masyarakat. Oleh karena itu, golongan keluarga sejahtera 2 hingga 3 *plus* adalah keluarga sejahtera

#### **2.2.4 Tinjauan Tentang Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)**

##### **2.2.4.1 Pengertian Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)**

Posdaya merupakan program pemberdayaan keluarga dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui layanan kesehatan, pendidikan, wirausaha, dan pengembangan lingkungan, yang memudahkan keluarga berkembang secara mandiri. Posdaya terbentuk atas inisiatif Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (DAMANDIRI) dalam kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia, khususnya melalui pemberdayaan keluarga dengan prioritas pada pengentasan kemiskinan. Dalam perumusan gagasan, yayasan Damandiri bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS).

Posdaya adalah forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sekaligus bisa dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi kekeluargaan secara terpadu. Upaya pemberdayaan yang ditawarkan dalam Posdaya diarahkan untuk mendukung penyegaran fungsi keluarga, yaitu keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi dan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Pemenuhan fungsi-fungsi ini

pada hakekatnya bermuara pada pemenuhan tujuan dan sasaran pembangunan abad milleneum (MDGs) yang ditetapkan sebagai program pembangunan di Indonesia (Suyono dan Haryanto, 2013 dalam Anwas 2019). Kedelapan fungsi keluarga tersebut apabila di cermati dapat disarikan menjadi tiga sekto yaitu Kesehatan, Pendidikan dan kewirausahaan. Ketiga sector tersebut menurut Suyono (2003) dalam Anwas (2019) merupakan fondasi dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

#### 2.2.4.2 Tujuan Posdaya

Posdaya adalah wadah kegotongroyongan di masyarakat dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan misi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan sasaran utama keluarga-keluarga miskin. Pengembangan posdaya ditujukan untuk tercapainya hal-hal sebagai berikut:

1. Dihidupkannya dukungan sosial budaya atau *social capital* seperti budaya hidup gotong royong dalam masyarakat untuk saling peduli sesama anak bangsa, saling tolong menolong antar keluarga dengan keluarga lain, saling mengulurkan bantuan pemberdayaan secara terpadu atau bersama-sama memecahkan masalah kehidupan yang komplek, melalui wadah atau forum yang memberi kesempatan setiap keluarga untuk saling asah, asih, dan asuh, dalam memenuhi kebutuhan membangun keluarga bahagia dan sejahtera.
2. Terpeliharanya infrastruktur sosial kemasyarakatan yang terkecil dan solid, yaitu keluarga, yang dapat menjadi perekat atau kohesi sosial, sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun, damai dan memiliki dinamika yang tinggi.
3. Terbentuknya lembaga sosial dengan keanggotaan dan partisipasi keluarga di desa atau kelurahan yang dinamis dan menjadi wadah atau wahana partisipasi

sosial, dimana setiap keluarga dapat memberi dan menerima pembaharuan yang bisa membantu proses pembangunan kehidupan keluarga dengan mulus dan sejuk (Suyono dan Haryanto, 2013 dalam Anwas 2019).

#### 2.2.4.3 Sasaran dan Jenis Kegiatan

Posdaya diharapkan mampu memberikan dukungan kepada keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, khususnya keluarga miskin. Keluarga miskin didorong mengikuti aturan yang ditetapkan bersama agar mampu berkembang menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Titik sentral kegiatan Posdaya adalah pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Sebagai wadah gotong royong Posdaya melibatkan orang-orang kaya di suatu wilayah sebagai kelompok peduli atau donatur yang akan berperan aktif sebagai penyedia dana untuk lancarnya kegiatan posdaya

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan KKN Pos Pemberdayaan Keluarga (Haryono dan Rohadi, 2011) dijelaskan bahwa proses pemberdayaan melalui Posdaya mengacu dan menempatkan prioritas yang tinggi pada upaya pengentasan kemiskinan, maka semua keluarga miskin atau tertinggal diusahakan secara sungguh-sungguh untuk ikut dalam setiap kegiatan Posdaya Suyono dan Haryanto (2013) juga menjelaskan bahwa sasaran kegiatan yang dituju adalah terselenggaranya upaya bersama agar setiap keluarga mempunyai kemampuan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Dalam rangka pelaksanaan MDGs, pengembangan fungsi keluarga tersebut diarahkan kepada lima prioritas sasaran utama, yaitu komitmen para pimpinan dan sesepuh tingkat desa dan pedukuhan, kecamatan dan kabupaten, pengembangan fungsi keagamaan, fungsi KB dan

kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi kewirausahaan dan fungsi lingkungan hidup yang memberi makna terhadap kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dengan demikian melalui upaya bersama tersebut akan menjadikan Posdaya sebagai wahana untuk membantu pemberdayaan keluarga yang memungkinkan setiap keluarga bisa saling belajar dari keluarga lain, atau dari narasumber yang didatangkan secara khusus ke Posdaya. Melalui pemberdayaan tersebut diharapkan setiap keluarga mampu menjadi subyek yang secara mandiri membangun seluruh anggota keluarganya.

Sasaran Posdaya secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Komitmen Para Pemimpin

- a) Para Kepala Desa dan aparatnya diharapkan dapat memberi perhatian dan bantuan pembentukan Posdaya di desanya.
- b) Camat, Bupati atau Walikota dan Tim Penggerak PKK dapat membantu dan mendampingi pengembangan Posdaya sebelum masyarakat sendiri mampu mengelola Posdaya.

2. Pemberdayaan Fungsi Keagamaan dan Budi Pekerti

Sasaran utamanya adalah pada keluarga muda, yaitu kepala keluarga dengan anak balita (umur dibawah lima tahun) atau anak remaja dengan tujuan agar kedua orang tua tidak saja memahami masalah agama tetapi bisa menjadi penuntun bagi anaknya dalam masalah keagamaan sejak usia dini. Ajakan kepada keluarga dengan anggota anak-anak remaja dan dewasa dengan tujuan agar kedua orang tua mengajak anak-anaknya melaksanakan ajaran agama

3. Pemberdayaan pada bidang KB-Kesehatan

Ibu muda, ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu menyusui; ibu muda dengan anak-anak dibawah usia 15 tahun; Bayi (0- 1) tahun, Anak Balita (1-5) tahun.

4. Pemberdayaan Bidang Pendidikan

- a) Inventarisasi anak-anak usia 0-15 tahun yang belum sekolah.
- b) Mengusahakan sekolah di desa untuk menerima anak-anak tersebut sekolah.
- c) Mengembangkan kemungkinan kursus-kursus ketrampilan untuk anak putus sekolah.

5. Pemberdayaan Bidang Wirausaha :

- a) Mengadakan inventarisasi keluarga dengan anak balita atau keluarga yang mempunyai anak dibawah usia 15 tahun.
- b) Mendorong agar keluarga mau berusaha dan mau bergabung dengan kelompok usaha mikro dan kecil yang telah ada di sekitar tempat kediamannya.
- c) Memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan keirausahaan serta dukungan pendampingan.
- d) Menjajagi kerjasama dengan perusahaan kecil menengah atau besar atau kegiatan usaha lain agar memiliki kesempatan untuk dititipkan sebagai proses magang dalam upaya pemberdayaan wirausaha.
- e) Menjajagi kerjasama dengan bank yang ada di desa atau di kecamatan dan mempunyai jaringan ke desa.
- f) Mengusahakan kerjasama dengan para pengusaha untuk membentuk koperasi.

- g) Mengadakan kerjasama dengan keluarga atau pengusaha dari daerah lain untuk bisa memperluas pemasaran produk oleh anggota Posdaya ke wilayah yang lebih luas.

#### 6. Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Keluarga Bergizi.

Sasaran utamanya adalah pemeliharaan, penyegaran, pengembangan dan pemanfaatan lingkungan sekitar rumah atau di lingkungan alam lainnya, termasuk pemeliharaan sanitasi dan pemanfaatan tanah-tanah kosong, lahan tidur di sekitar rumah atau lingkungan desa. Tujuannya adalah agar setiap keluarga dapat memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan halaman atau tanah kosong dengan menanam tanaman yang berguna untuk memelihara kelestarian alam, merawat lingkungan dan memperbesar manfaat untuk peningkatan gizi atau pendapatan keluarga.

#### 2.2.4.4 Sumber Daya Posdaya

Agar kegiatan Posdaya dengan baik perlu dukungan tenaga, dana dan sarana. Sumber-sumber dukungan menurut Haryono dan Rohadi (2011) dalam Anwas (2019) antara lain adalah :

1. Tenaga, yaitu:
  - a) Tenaga KB -Kesehatan terdiri dari beberapa anggota, antara lain: Pimpinan dan Staf Dinas Kesehatan atau Badan KB tingkat Kabupaten/Kota, Pimpinan dan staf PUSKESMAS, petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) , Bidan PUSKESMAS/Bidan Desa, dan Pembantu Bidan/Perawat.
  - b) Sektor pembangunan pendidikan dan sosial yang terdiri dari: Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Tim Pembina Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Kader-kader P3K (sosial)

- c) Unsur Masyarakat, antara lain: LKMD, alim ulama, guru, para pengusaha di desa dan kecamatan, kader POSYANDU, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD, Kader Dasawisma, Kader Pembangunan Desa, Kader Pemuda/Karang Taruna, Para siswa SMP dan SMA setempat dan Pramuka
- d) Unsur pamong, terdiri dari: Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkatnya, termasuk Kepala Dusun, Dukuh atau RW/RT.

## 2. Dana dan Sarana

Dana dan sarana dapat berasal dari sumber-sumber berikut:

- a) Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara (APBN) dari Dinas Kesehatan, Badan KB, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Agama, Dinas Koperasi dan sektor pembangunan lain yang terkait.
- b) Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dari Propinsi dan Kabupaten/Kota
- c) Swadaya masyarakat, zakat dan sumbangan sosial lainnya
- d) Sumbangan dari donator lainnya yang tidak mengikat.
- e) Dukungan dari perusahaan sebagai tanggung jawab sosial.

### **2.2.5 Tinjauan Tentang Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Komunitas**

#### 2.2.5.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan Sosial dalam menangani permasalahan sosial diarahkan pada upaya membantu dan menolong individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar

dapat berfungsi sosial sesuai dengan status dan peranannya dalam kehidupan masyarakat.

Zastrow (2017) menyatakan bahwa:

Pekerja sosial adalah kegiatan professional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Berdasarkan definisi pekerjaan sosial tersebut, dapat disimpulkan bahwa

1. Pekerjaan sosial merupakan kegiatan professional
2. Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang membantu individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat.
3. Pekerjaan sosial menyediakan layanan sosial dan bantuan intervensi secara ekonomi, fisik, mental, dan sosial bagi yang kurang beruntung.
4. Pekerjaan sosial bertujuan membantu orang mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk menggunakan sumberdaya sendiri dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah.

#### 2.2.5.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah suatu bidang keahlian yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan atau mengembangkan interaksi-interaksi diantara orang dengan lingkungan sosial sehingga orang dapat memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, mengatasi kesulitan-kesulitan, serta mewujudkan aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai mereka. Zastrow (2017) mengemukakan tujuan pekerjaan sosial, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi masalah, dan mengembangkan kapasitas.

2. Menghubungkan orang dengan sistem yang memberikan sumber-sumber, berbagai pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.
5. Mempromosikan kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pekerjaan sosial harus memiliki seni dalam usaha-usaha menyadarkan klien untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang dihadapi, bahwa tidak semua harapan-harapan yang diinginkan sesuai dengan kenyataan yang diterima dengan cara meningkatkan keberfungsian sosial klien yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan klien.

#### 2.2.5.3 Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial bertujuan untuk membantu orang meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas kehidupan. Joewono dalam Haryanto (2009) membagi fungsi dasar pekerjaan sosial menjadi 7 (tujuh) bagian sebagai berikut:

1. Membantu orang untuk meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memecahkan masalah mereka.
2. Menciptakan jalur-jalur hubungan pendahuluan diantara orang dengan sistem-sistem sumber.
3. Mempermudah interaksi, merubah, dan menciptakan hubungan-hubungan baru diantara orang dengan sistem sumber kemasyarakatan.

4. Mempermudah interaksi, merubah, dan menciptakan hubungan-hubungan baru diantara orang-orang di lingkungan sistem-sistem sumber.
5. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, dan perkembangan, kebijakan dan perundang-undangan sosial.
6. Memeratakan sumber-sumber materiil.
7. Bertindak sebagai pelaksana kontrol sosial.

#### 2.2.5.4 Metode dan Prinsip Pekerjaan Sosial

Praktik pekerjaan sosial terdiri dsri tiga tingkatan yaitu: a) aras mikro, bekerja atas dasar satu kesatu dalam individu dan keluarga, b) aras mezzo, bekerja dengan keluarga dan kelompok kecil lainnya, dan c) aras makro, bekerja dengan orgaisasi dan komunitas atau mencari perubahan dalam undang-undang dan kebijakan sosial.

Aktivitas lebih spesifik mengenai 3 tingkatan praktik pekerjaan sosial dijelaskan oleh Zastrow (2017) sebagi berikut:

##### 1. *Social Case Work*

Bimbingan sosial individu/perseorangan adalah suatu rangkaian pendekatan teknik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk membantu individu yang mengalami masalah berdasarkan relasi antara pekerja sosial dengan seorang penerima pelayanan secara tatap muka. Menurut Richmond dalam Juda (2007) *social casework* menggabungkan empat proses: wawasan kepada individu, wawasan kepada lingkungan sosial, tindakan langsung pikiran atas pikiran, dan tindakan tidak langsung melalui lingkungan sosial. Prinsip dasar pada bimbingan sosial perseorangan adalah:

- a) Penerimaan, seorang pekerja sosial harus mau menerima dan menghormati penerima pelayanan (klien) dalam setiap kondisi yang dialaminya.
- b) Komunikasi, antara pekerja sosial dan klien harus saling memberi dan menerima informasi.
- c) Individualisasi, pekerja sosial harus memahami, menerima bahwa klien sebagai pribadi yang unik, dalam arti berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya.
- d) Partisipasi, pekerja sosial harus ikut serta secara langsung dalam membantu mengatasi permasalahan klien.
- e) Kerahasiaan, pekerja sosial harus mampu merahasiakan informasi yang diberikan oleh klien.
- f) Kesadaran diri, sebagai manusia pekerja sosial menyadari akan respon klien serta motivasi dan relasi bantuan profesional.

Pekerja sosial profesional yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman menggunakan metode bimbingan sosial perorangan ini akan menghindari sejauh mungkin bias-bias subyektifitas dan interest pribadi.

## 2. *Social Group Work*

Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Jadi bimbingan sosial kelompok digunakan untuk membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok/lingkungan sosialnya dengan kondisi tertentu atau membantu kelompok mencapai tujuannya.

Fokus *social group work* termasuk perkayaan, pendidikan, dan reformasi sosial. Sebagai suatu metode pekerjaan sosial, *social group work* menggunakan saling pengaruh kepribadian dalam proses-proses kelompok untuk mencapai tindakan kelompok yang kooperatif yang mengamalkan tujuan-tujuan bersama (Zastrow, 2017). Beberapa prinsip bimbingan sosial kelompok antara lain:

- a) Pembentukan kelompok secara terencana.

Kelompok merupakan satu kesatuan dimana individu memperoleh pelayanan untuk mengembangkan pribadinya. Kelompok yang telah terbentuk, maka badan sosial yang menerima kelompok dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan situasi kelompok, terutama yang dapat memberikan kemungkinan untuk perkembangan individu menuju ke arah positif dalam pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok.

- b) Memiliki tujuan yang akan dicapai bersama.

Di dalam bimbingan sosial kelompok tujuan, perkembangan individu dan kelompok harus dirumuskan dengan cermat oleh pembimbing kelompok agar terdapat keserasian antara harapan dan kemampuan kelompok.

- c) Penciptaan interaksi terpimpin.

Dalam bimbingan sosial kelompok harus dibina hubungan yang bertujuan antara pekerja sosial dengan anggota-anggota kelompok dan atas dasar keyakinan bahwa pekerja sosial akan menerima anggota kelompok sebagaimana adanya.

- d) Pengambilan keputusan.

Kelompok harus dibantu dalam mengambil keputusan-keputusan sendiri dan menentukan kegiatan yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya.

- e) Organisasi bersifat fleksibel dalam arti organisasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Organisasi yang formal harus fleksibel dan harus didorong bila sedang berusaha mencapai tujuan yang penting, yang dipahami oleh para anggotanya dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.
- f) Penggalian sumber-sumber dan penyusunan program. Sumber yang ada di masyarakat harus dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman kelompok, untuk dimanfaatkan para anggota dan kelompok itu sendiri. Penilaian kegiatan secara terus-menerus terhadap proses dan hasil program atau pekerjaan kelompok yang merupakan jaminan dan pertanggungjawaban terhadap apa yang diselesaikan masing-masing pihak untuk keseluruhan.

### 3. *Community Organization*

Bimbingan sosial dengan masyarakat sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat serta menekankan dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Upaya tersebut cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat seperti kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak dan lain sebagainya.

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah:

- a) Penyusunan program didasarkan kebutuhan nyata yang mendesak di masyarakat.
- b) Partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat.
- c) Bekerja sama dengan berbagai badan dalam rangka keberhasilan bersama dalam pelaksanaan program.
- d) Titik berat program adalah upaya untuk pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, pengembangan dan dukungan.

#### 2.2.5.5 Sistem Dasar Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai kegiatan profesional memiliki sistem dasar praktik pekerjaan sosial dalam melaksanakan kegiatan pertolongannya (Pincus dan Minahan dalam Sukoco, 2019). Sistem dasar praktik pekerjaan sosial tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1. Sistem Pelaksana Perubahan (*Change Agent System*)

Sistem pelaksana perubahan (*change agent system*) adalah sekumpulan profesional yang secara khusus bekerja untuk menciptakan perubahan secara terencana. Sistem pelaksana perubahan juga merupakan bagian dari sistem pelaksana perubahan yang mempekerjakan agen perubahan tersebut. Istilah organisasi pelaksana adalah penting sebagaimana pandangan Pincus dan Minahan sepadan dengan penghargaannya (dibayar sesuai kemampuannya) secara perorangan sebagai agen perubahan. Seorang agen perubahan dengan demikian, adalah seorang profesional yang secara khusus dipekerjakan dalam rangka perubahan berencana.

## 2. Sistem Klien (*Client System*)

Sistem klien (*client system*) adalah sejumlah orang yang sepakat atau meminta pelayanan kepada agen perubahan yang bekerja berdasarkan kesepakatan atau kontrak dengan agen perubahan. Klien dengan demikian dipergunakan dengan penuh kesadaran daripada yang sering diperlakukan oleh pekerja sosial, menghindari kemungkinan dari “melakukan sesuatu” terhadap orang atau organisasi tanpa sepenghuan atau kesepakatan mereka.

## 3. Sistem Sasaran (*Target System*)

Sistem sasaran (*target system*) adalah sekumpulan orang, badan-badan, dan atau organisasi praktek yang memerlukan perubahan melalui pengukuran tertentu dalam upaya mencapai tujuan melalui agen perubahan. Misalkan, melalui penganalisaan perubahan sistem sasaran dapat terukur efektivitasnya dan memberikan suatu mekanisme pertanggungjawaban.

## 4. Sistem Kegiatan (*Action System*).

Sistem kegiatan (*action system*) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan dengan siapa saja pekerja sosial bekerja dalam upayanya memenuhi tugasnya dan mencapai tujuan perubahan yang diharapkan. Salah satunya mungkin akan melibatkan sejumlah sistem kegiatan dengan aspek yang berbeda dari upaya perubahan terencana untuk melengkapi keseluruhan rencana perubahan dari pelaksana (agen) perubahan. Konsep dari metode dan tujuan hasil juga dipergunakan untuk lebih jauh lagi membedakan bagaimana sistem kegiatan dan sistem sasaran dikembangkan dan didayagunakan

#### 2.2.5.6 Sistem Sumber Kesejahteraan Sosial

Sistem sumber merupakan potensi yang strategis sekali diberdayakan untuk membantu tercapai tujuan pemecahan masalah. Identifikasi sumber dimaksudkan untuk mendapatkan dan mengetahui kekuatan-kekuatan pendukung yang relevan dan mempunyai peluang untuk diberdayakan dalam upaya pemecahan masalah. Pincus dan Minahan dalam Azzahroo, Susilowati, dan Hambali, 2020 mengklasifikasikan sumber sebagai berikut:

1. Sistem sumber informal (*informal or natural resources system*)

Sistem sumber informal atau alamiah merupakan segala bentuk dukungan, bantuan dan pelayanan yang dapat digali dan dimanfaatkan dari lingkungan terdekat seperti: keluarga, teman, kerabat ataupun tetangga. Bentuk-bentuknya dapat berupa dukungan emosional, kasih sayang, perhatian, nasehat, informasi, serta bantuan-bantuan konkrit seperti bantuan makan, pakaian ataupun uang. Sistem sumber ini dapat pula dijadikan jalan bagi pemanfaatan sistem sumber lainnya.

2. Sistem sumber formal (*formal resources system*)

Sistem sumber formal merupakan sistem sumber yang dapat memberikan bantuan, dukungan, ataupun pelayanan bagi para anggotanya melalui suatu wadah organisasi yang sifatnya formal, seperti: serikat buruh, perhimpunan orang tua anak-anak yang kecerdasannya dibawah normal, persatuan orang tua murid, maupun organisasi –organisasi profesional. Keberadaan sistem –sistem sumber ini dapat pula digunakan dan dimanfaatkan sebagai jalan bagi akses terhadap sumber-sumber lainnya.

### 3. Sistem Sumber Kemasyarakatan (*sosial resources System* )

Sistem sumber kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah ataupun swasta yang memberikan pelayanan kepada semua orang, misalnya sekolah, rumah sakit, lembaga bantuan hukum serta badan-badan sosial, lembaga pelatihan dan penempatan tenaga kerja, perpustakaan, tempat-tempat rekreasi dan fasilitas sosial lainnya, orang-orang umumnya terkait dengan salah satu atau bahkan beberapa dari sistem sumber kemasyarakatan.

Selain itu, Field (2008) mengungkapkan bahwa ada beberapa jenis modal yang lazim diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan manfaat sosial, diantaranya yaitu:

#### 1. Sumber Daya/ Modal Finansial

Modal finansial adalah upaya untuk mengelola, meningkatkan, mengalokasikan dan menggunakan sumber daya milik perorangan, organisasi, atau komunitas.

#### 2. Sumber Daya/Modal Sosial

Modal sosial adalah upaya mengelola meningkatkan dan mendayagunakan relasi-relasi sosial seperti norma, nilai, jaringan dan kepercayaan.

#### 3. Sumber Daya/ Modal Fisik

Sumber daya fisik merupakan faktor produksi barang dan jasa yang mendatangkan keuntungan ekonomi atau manfaat sosial melalui kegiatan produktif berupa bahan baku (sumber daya alam), sarana (infrastruktur, mesin, gedung, peralatan).

#### 4. Sumber Daya/Modal Manusia

Modal manusia merupakan upaya mengelola meningkatkan, mendayagunakan, kepandaian, skill, tingkat dan keragaman pendidikan, serta pengalaman.

##### 2.2.5.7 Pengertian Pekerjaan Sosial Komunitas (*Community Work*)

Pekerjaan Sosial Komunitas merupakan bentuk dari praktik yang dikemas sebagai bentuk intervensi profesional diarahkan untuk membawa perubahan terencana (*planned change*) dalam organisasi dan komunitas (Netting, et al, 2004:3)

Pekerja Sosial Komunitas (*community work*) adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial (Suharto, 2017).

##### 2.2.5.8 Model Pendekatan Intervensi Makro

Penanganan masalah komunitas, dapat menggunakan metode makro dengan beberapa model pendekatan. Rothman dan Tropman dalam Isbandi (2012:85-88) menjelaskan bahwa model pendekatan dalam intervensi makro ialah sebagai berikut:

###### 1) Model *Locality Development/ Community Development*

Model ini memiliki pandangan bahwa merubah atau mengembangkan suatu masyarakat bisa dilakukan dengan baik melalui suatu partisipasi ataupun kontribusi aktif dari masyarakat lokal.

###### 2) Model *Social Planning*

Model ini memfokuskan pada proses teknik untuk memecahkan suatu masalah. *Social Planning* percaya bahwa masalah yang menimpa masyarakat dan

lingkungannya itu rumit, sehingga memerlukan seorang perencana yang mempunyai kemampuan keterampilan yang terlatih serta bisa membimbing masyarakat untuk melaksanakan proses perubahan yang kompleks.

### 3) Model *Social Action*

Model ini mempunyai persepsi bahwa di dalam suatu masyarakat akan ada bagian/kelompok yang belum mampu dan perlu untuk dibantu, diorganisasikan agar menekan struktur kewenangan yang menindasnya. Langkah ini dilaksanakan guna mendapat sumber-sumber ataupun sikap yang lebih baik sesuai dengan asas keadilan serta demokrasi.

Model pendekatan yang akan digunakan pada aras makro harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang menjadi akan sasaran perubahan dalam praktik pekerjaan sosial komunitas (*community work*).

#### 2.2.5.9 Strategi dan Taktik Pekerjaan Sosial Makro

Ada beberapa strategi serta taktik yang bisa digunakan saat pelaksanaan metode makro dalam praktik pekerjaan sosial seperti yang dijelaskan oleh Brager et al (1987:58). Taktik dalam konsep pekerjaan sosial telah dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

##### 1) *Collaboration* (Kolaborasi)

Kolaborasi bermakna suatu sistem sasaran dengan sistem kegiatan setuju akan perlunya perubahan, serta sistem sasaran mendukung perubahan dengan mengalokasikan sumber yang dapat digunakan selama proses perubahan. Taktik yang bisa digunakan dalam kondisi dan situasi tersebut yaitu: (a) Implementasi; serta (b) *Capacity Building* yang dapat dilakukan melalui partisipatif.

## 2) *Campaign* (Kampanye)

Kampanye bermakna suatu sistem sasaran dengan sistem kegiatan setuju akan perlunya perubahan, sistem sasaran hanya mendukung namun tidak diikuti dengan pengalokasian sumber yang dapat digunakan selama proses perubahan. Taktik yang digunakan dalam kondisi tersebut yaitu: (a) Edukasi; (b) Persuasif melalui *cooptation* dan *lobbying*, dan (c) Meminta bantuan Massa Media.

## 3) *Contest* (Kontes)

Kontes adalah suatu bagian taktik bilamana tidak satupun pendekatan kolaborasi serta kampanye memungkinkan untuk dilaksanakan. Taktik yang bisa dimanfaatkan dalam kondisi dan situasi tersebut ialah: (a) *Bargaining* & Negosiasi; (b) Aksi masyarakat; dan (c) Aksi penuntutan perkara.

### 2.2.5.10 Peran Pekerja Sosial Komunitas

Menurut Edi Suharto (2017) menyatakan beberapa peranan yang bisa dilakukan oleh profesi pekerjaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Komunitas melalui pengembangan potensi serta kemampuannya sesuai dengan yang terdapat di wilayahnya, ialah sebagai berikut:

#### 1. *Fasilitator atau Enabler*

Sebagai *enabler*, pekerja sosial mempunyai kedudukan untuk membagikan peluang kepada komunitas supaya dapat berkontribusi aktif dalam aktivitas sosial di masyarakat agar sanggup menemukannya permasalahan, kebutuhan, potensi atau kemampuan, serta sumber-sumber yang ada untuk didayagunakan dalam pemecahan masalah ataupun pemenuhan kebutuhan sendiri secara lebih efisien. Dasar filosofis ini merupakan “*to help people to help themselves*”, pekerja sosial

dalam perihal ini berperan dalam membantu masyarakat supaya bisa sadar akan kondisi dan situasi, membangkitkan motivasi guna memperbaiki serta meningkatkan sistem jaringan untuk kerjasama juga menolong dalam pembuatan perencanaan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:188), "*The traditional role of enabler in social work implies education, facilitation, and promotion of interaction and action.*" Selanjutnya Brager (1987) juga menambahkan mengenai definisi fasilitator merupakan tanggungjawab dalam menolong masyarakat sehingga lebih mampu dalam menanggulangi tekanan situasional ataupun transisional. Strategi-strategi khusus untuk menggapai tujuan tersebut yakni mengidentifikasi dan mendorong kekuatan individu dan aset sosial yang dimiliki, memilih masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah untuk dipecahkan, memelihara fokus tujuan serta cara-cara untuk mencapainya mengurangi penolakan dan ambivalensi, mengaku dan mengatur perasaan-perasaan, dan memberi harapan.

## 2. *Advocator*

Peranan pekerja sosial sebagai pembela atau advokator ialah peran yang aktifserta terencana, disini pekerja sosial sebagai wakil masyarakat yang perlu akan bantuan menuntut serta melaksanakannya demi kepentingan masyarakat. Pekerja sosial membela kepentingan masyarakat dengan memperjuangkan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat. Pekerja sosial juga memberikan pelayanan dalam upaya pembinaan serta pemberdayaan komunitas tersebut supaya dapat bertahan hidup (*survive*) dan tentram dalam kehidupannya dengan nilai tradisi yang

percaya. Advokator acapkali harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang dibutuhkan oleh masyarakat komunitas, manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau sehingga advokator harus memainkan peranan yaitu melaksanakan pembelaan langsung yang bersentuhan dengan kegiatan politik baik secara kasus yaitu melakukan pembelaan atas nama seorang individual dan pembelaan kelas yaitu terjadi manakala klien dibela bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat yang hidup berdampingan.

### 3. *Mediator*

Peran ini sangat dibutuhkan ketika adanya perbedaan yang mencolok serta menuju pada terjadinya konflik dari berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986) memberikan contoh kalau mediator dapat memerankan kedudukannya sebagai “fungsi kekuatan ketiga” guna menjembatani antar anggota kelompok serta sistem lingkungan yang menghambatnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam peran ini yaitu negoisasi, kontrak sikap, mendamaikan pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Peran mediasi, berupa upaya-upaya yang dicoba pada hakikatnya ditunjukkan untuk menggapai “solusi menang-menang” (*win-win solution*) dengan strategi negoisasi. Perihal ini berbeda dengan peran sebagai advokator, dimana pertolongan ditunjukkan guna memenangkan sebuah kasus dari klien melalui strategi kontes.

### 4. *Broker*

Pekerja sosial melaksanakan penjangkaran layanan sosial, oleh sebab itu sangat berarti guna memahami mutu pelayanan sosial di sekitar lingkungannya